RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, perlu diatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pendanaan pemerintahan yang proporsional, transparan, akuntabel dan efisien dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi dan pinjaman, pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara, potensi, kondisi, dan kebutuhan pemerintahan daerah, yang sejalan dengan pembagian urusan serta tata cara penyelenggaraan urusan tersebut, termasuk pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang melimpahkan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada kabupaten dan kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
19. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD, adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

21. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
23. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
24. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
25. Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
26. Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat CHT, adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
27. DBH Sumber Daya Alam adalah dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
28. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, yang selanjutnya disingkat IIUPH, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
29. Provisi Sumber Daya Hutan, yang selanjutnya disingkat PSDH, adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

30. Dana Reboisasi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
31. Iuran Tetap adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dan pertambangan panas bumi.
32. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan umum dan pertambangan panas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dan pertambangan panas bumi.
33. Setoran Bagian Pemerintah adalah penerimaan negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Bagian Negara dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut Bagian Negara, adalah penerimaan negara yang diperoleh dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak bumi dan gas bumi.
35. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
36. Celah Fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah.
37. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan Daerah.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

39. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik.
40. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN untuk mendanai urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di Daerah.
41. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN untuk mendanai urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada kabupaten dan kota.
42. Hibah kepada Daerah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada Daerah berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali.
43. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana.
44. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
47. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ SKPD.
48. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan keuangan Negara.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pembagian sumber-sumber keuangan Negara.

- (3) Pembagian sumber-sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan urusan oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- (4) Sumber-sumber keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi sumber-sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mencakup:
 - a. pajak dan retribusi Daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. hibah;
 - e. dana darurat; dan
 - f. pinjaman.
- (5) Pembagian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didasarkan atas pelimpahan urusan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan dimaksud.
- (6) Pembagian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan didasarkan atas penugasan oleh Pemerintah kepada kabupaten dan kota dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dimaksud.

Pasal 3

- (1) Pajak Daerah dan retribusi Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintahan Daerah.
- (3) Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk menambah sumber pendanaan bagi daerah otonom khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah merupakan sumber pendanaan bagi Daerah yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pinjaman yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendanai kegiatan tertentu.

- (5) Dana Darurat bertujuan untuk membantu daerah mendanai kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (6) Pinjaman Daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pengaturan hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 3 menjadi dasar dalam pengaturan:

- a. perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. pengalokasian dana dari APBN ke APBD.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan urusan oleh Pemerintah kepada Gubernur diikuti dengan pendanaan dari APBN.
- (2) Penugasan urusan oleh Pemerintah kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pendanaan dari APBN.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara.

BAB III

PENDANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan kabupaten dan kota dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

Pasal 8

- (1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dilarang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang menjadi urusan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang mendanai program atau kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengurangan/pemotongan anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Perimbangan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

Dalam memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

BAB V

DANA PERIMBANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Dana Perimbangan

Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) Besarnya Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang tentang APBN.

Bagian Kedua
Dana Bagi Hasil
Pasal 14

- (1) DBH bersumber dari:
 - a. Pajak;
 - b. Cukai; dan
 - c. Sumber Daya Alam.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PBB;
 - b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) DBH Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah cukai hasil tembakau.
- (4) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. pertambangan minyak bumi;
 - d. pertambangan gas bumi; dan
 - e. pertambangan panas bumi.

Paragraf Kesatu
DBH Pajak
Pasal 15

- (1) DBH Pajak yang bersumber dari PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dengan rincian:
 - a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dibagi dengan rincian:
 - a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi dibagi dengan rincian:
 - a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

- b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama besar.
- (4) Khusus untuk penerimaan PBB yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah tidak dibagihasilkan kepada Daerah.
- (5) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) DBH Pajak yang bersumber dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian:
 - a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pembagian kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada wilayah Daerah tempat tinggal wajib pajak, tempat kegiatan usaha, dan/atau tempat bekerja.

Paragraf Kedua

DBH Cukai

Pasal 17

- (1) DBH Cukai yang bersumber dari CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dengan rincian:
 - a. 0,4% (nol koma empat persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pembagian untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada kontribusi Daerah yang bersangkutan terhadap penerimaan CHT dan/atau produksi tembakau.

Paragraf Ketiga

DBH Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) DBH Sumber Daya Alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a berasal dari:
 - a. IIUPH;
 - b. PSDH; dan
 - c. Dana Reboisasi.

- (2) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (5) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 19

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, berasal dari:
 - a. Penerimaan Iuran Tetap; dan
 - b. Penerimaan Iuran Produksi.
- (2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Tetap sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi, seluruhnya dialokasikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- (5) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Produksi sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi dibagi dengan rincian:
- a. 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, berasal dari Bagian Negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dengan rincian:
- a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 6,25% (enam koma dua lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 6,25% (enam koma dua lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi dibagi dengan rincian:
- a. 5% (lima persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 10,5% (sepuluh koma lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, berasal dari Bagian Negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dengan rincian:
- a. 6% (enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

- b. 12,25% (dua belas koma dua lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 12,25% (dua belas koma dua lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi dibagi dengan rincian:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 20,5% (dua puluh koma lima persen) dibagikan untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen), Pasal 20 ayat (3) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen), Pasal 21 ayat (3) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Pasal 23

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e, berasal dari:
- a. Setoran Bagian Pemerintah;
 - b. Iuran Tetap; dan
 - c. Iuran Produksi.
- (2) DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan bobot pembagian DBH:
- a. CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c;
 - b. Sumber Daya Alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c;
 - c. Sumber Daya Alam pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c dan dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b;

- d. Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (3) huruf b;
 - e. Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (3) huruf b; dan
 - f. Sumber Daya Alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c;
- untuk masing-masing kabupaten dan kota.
- (2) Bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, antara lain, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
 - (3) Formula dan data yang digunakan dalam menetapkan bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
 - (4) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
 - (5) Bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Menteri untuk menetapkan besaran alokasi untuk masing-masing kabupaten dan kota.
 - (6) Dalam hal bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan besaran alokasi untuk masing-masing kabupaten dan kota dengan porsi yang sama besar.

Paragraf Keempat

Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil

Pasal 25

Menteri menetapkan alokasi sementara DBH Pajak dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagai dasar alokasi DBH Sumber Daya Alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, menteri teknis menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

- (3) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 27

- (1) Menteri dan menteri teknis menetapkan prognosa realisasi penerimaan pajak, CHT, dan sumber daya alam per Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan prognosa realisasi penerimaan sumber daya alam kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Menteri menetapkan prognosa realisasi DBH untuk masing-masing Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Paragraf Kelima

Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pasal 28

Penyaluran DBH dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan per triwulan.
- (2) Penyaluran triwulan kesatu, kedua dan ketiga dilakukan untuk masing-masing:
 - a. DBH Pajak dan DBH CHT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi sementara DBH Pajak dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. DBH Sumber Daya Alam sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (3) Penyaluran untuk triwulan keempat dilakukan berdasarkan prognosa realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan memperhitungkan penyaluran 3 (tiga) triwulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal jumlah penyaluran triwulan kesatu, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi prognosa realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan dengan penyaluran tahun anggaran berikutnya atau dana perimbangan lainnya pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

Dalam hal terdapat selisih kurang antara prognosa realisasi dengan realisasi pada akhir tahun, selisih kurang dimaksud diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Umum

Pasal 31

- (1) DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Pendapatan Dalam Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan DBH.
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. Kabupaten dan kota sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perubahan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.

Pasal 32

- (1) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal.
- (2) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah daratan dan perairan, Indeks Pembangunan Manusia, dan kondisi geografis Daerah yang dicerminkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi.
- (5) Kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari PAD dan DBH.

Pasal 33

- (1) Kebutuhan fiskal suatu Daerah dihitung sebagai hasil perkalian rata-rata belanja Daerah secara nasional dengan jumlah perkalian bobot-bobot variabel indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi.
- (2) Rata-rata belanja Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi total belanja Daerah dengan jumlah Daerah.
- (3) Bobot variabel indeks jumlah penduduk, variabel indeks luas wilayah, variabel indeks pembangunan manusia dan variabel indeks kemahalan konstruksi ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
- (4) Indeks jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi jumlah penduduk suatu Daerah dengan rata-rata jumlah penduduk secara nasional.
- (5) Indeks luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi luas wilayah suatu Daerah dengan rata-rata luas wilayah secara nasional.
- (6) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah indeks pembangunan manusia suatu Daerah dengan rata-rata celah indeks pembangunan manusia secara nasional.
- (7) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi indeks kemahalan konstruksi suatu Daerah dengan rata-rata indeks kemahalan konstruksi secara nasional.

Pasal 34

- (1) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi.
- (2) Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi Celah Fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total Celah Fiskal seluruh provinsi.

Pasal 35

- (1) DAU untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi Celah Fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total Celah Fiskal seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 36

Bobot masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan bobot masing-masing kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang tidak ada penambahan Daerah baru.

Pasal 37

- (1) Dalam hal alokasi DAU suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 mengalami penurunan dari alokasi DAU pada tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, maka Daerah yang bersangkutan diberikan DAU sebesar DAU tahun terakhir.
- (2) Pengalokasian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya formula penghitungan DAU berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Pengalokasian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi alokasi DAU kepada Daerah lain.

Paragraf Kesatu

Mekanisme Pengalokasian

Pasal 38

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf Kedua

Penetapan Alokasi

Pasal 39

- (1) Menteri menetapkan alokasi DAU untuk masing-masing Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi alokasi masing-masing Daerah, dasar penghitungan alokasi DAU dan sumber data yang digunakan.

Paragraf Ketiga

Penyaluran

Pasal 40

- (1) DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Penyaluran DAU untuk masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Bagian Keempat

Dana Alokasi Khusus

Pasal 41

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum;
 - b. kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional; dan
 - c. kegiatan dalam rangka kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. prioritas nasional berdasarkan sektor/bidang; dan
 - b. prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Pasal 42

DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a.

Pasal 43

- (1) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Daerah dengan kemampuan keuangan rendah dan sedang; dan
 - b. Daerah yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimum pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.
- (2) Penentuan Daerah yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh menteri teknis yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.

Pasal 44

- (1) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dihitung dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penerimaan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dari PAD, DAU dan DBH.
- (3) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks.
- (4) Indeks kemampuan keuangan suatu daerah (IKKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi kemampuan keuangan Daerah yang bersangkutan dengan rata-rata kemampuan keuangan Daerah secara nasional dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 45

- (1) Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dihitung dengan membandingkan capaian pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan.
- (2) Hasil perhitungan tingkat pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

Pasal 46

- (1) Daerah yang mendapat DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, adalah Daerah dengan IKKD di bawah rata-rata nasional dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum di bawah Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan.
- (2) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing bidang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 47

- (1) Alokasi DAK per tahun suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.
- (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi penjumlahan IKKD dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum Daerah yang bersangkutan dengan total IKKD dan total indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum seluruh Daerah.

Pasal 48

- (1) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional berdasarkan sektor/bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. kriteria teknis.
- (2) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional berdasarkan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria teknis.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan indikator-indikator khusus dalam bentuk indeks teknis.

Pasal 49

- (1) Alokasi DAK suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.
- (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi penjumlahan IKKD dan indeks teknis Daerah yang bersangkutan dengan total IKKD dan indeks teknis seluruh Daerah.
- (3) Alokasi DAK suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.
- (4) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi indeks teknis Daerah yang bersangkutan dengan indeks teknis seluruh Daerah.

Pasal 50

- (1) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. pencapaian wajib belajar;
 - b. peningkatan profesionalisme guru;
 - c. pemberian insentif;
 - d. pengembangan kawasan tertentu.
- (2) Pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, untuk Daerah ditetapkan berdasarkan biaya per unit yang mencerminkan kebutuhan dana.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan antara lain rasio pajak, rasio belanja pegawai dan rasio belanja modal.

- (4) Dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan/atau pembangunan infrastruktur dasar.
- (5) Dalam hal terdapat DAK dalam rangka kebijakan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalokasian DAK tersebut dihitung dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
- (6) Besaran alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan biaya per unit kegiatan.

Pasal 51

- (1) Daerah penerima DAK prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari besaran alokasi DAK yang diterima.
- (2) Besarnya dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan indeks kemampuan keuangan daerah.
- (3) Indeks kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam skala tertentu.
- (4) Skala indeks dan besarnya dana pendamping untuk masing-masing skala indeks dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 52

DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik.

Paragraf Kesatu

Mekanisme Pengalokasian

Pasal 53

- (1) Menteri teknis menetapkan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan indeks teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) per bidang.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan Juni setiap tahun.
- (3) Ketetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat indikator-indikator yang digunakan dan cara menghitung indeks teknis serta sumber data yang digunakan.

Pasal 54

- (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga mengusulkan kegiatan khusus kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri.

- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengkoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai kegiatan khusus yang akan didanai dana alokasi khusus.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan target dan sasaran penuntasan kegiatan yang akan didanai dari DAK.
- (4) Berdasarkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengalokasikan DAK dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara dan kesesuaian dengan rencana kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan DAK dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf Kedua

Penetapan Alokasi

Pasal 56

- (1) Menteri menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan.
- (2) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi alokasi masing-masing Daerah, dasar penghitungan alokasi DAK dan sumber data yang digunakan.

Pasal 57

- (1) Menteri/pimpinan lembaga teknis menetapkan pedoman umum penggunaan DAK untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan prioritas nasional sebagai dasar pelaksanaan kegiatan DAK di Daerah.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan.
- (3) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf Ketiga

Penyaluran

Pasal 58

- (1) DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) DAK untuk pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, DAK untuk prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dan DAK untuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c disalurkan secara bertahap sesuai dengan laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran karena tidak adanya laporan realisasi penyerapan dana, sisa alokasi DAK yang belum dicairkan tidak dapat disalurkan.
- (4) DAK untuk kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (5), disalurkan per triwulan.

Paragraf Keempat

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Sanksi

Pasal 59

Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.

Pasal 60

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan teknis pelaksanaan DAK setiap semester kepada menteri teknis.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan teknis pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis mengusulkan kepada Menteri untuk:
 - a. menunda penyaluran DAK pada tahap berikutnya; dan
 - b. tidak mengalokasikan DAK tahun anggaran berikutnya.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penetapan bidang, pengalokasian, pelaporan dan sanksi serta pemantauan dan evaluasi DAK diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 62

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk Daerah baru, mulai dialokasikan secara mandiri pada tahun ketiga sejak Undang-Undang pembentukannya diundangkan.

- (2) Selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang pembentukannya diundangkan, Dana Perimbangan untuk Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari alokasi Dana Perimbangan Daerah Induk.
- (3) Proporsi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Pasal 63

Tata cara penyaluran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

DANA OTONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 64

- (1) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Undang-Undang otonomi khusus.
- (3) Besaran alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Menteri.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 65

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi; dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu

Batasan Pinjaman

Pasal 66

- (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman untuk membiayai sebagian anggarannya.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (3) Pinjaman kepada pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pemerintah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Sumber, Jenis dan Penggunaan Pinjaman

Pasal 68

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan melalui Menteri.

- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal domestik.

Pasal 69

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
 - a. pinjaman jangka pendek; dan
 - b. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada bank yang ditunjuk sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pinjaman jangka pendek tanpa melalui persetujuan DPRD.
- (4) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

Pasal 71

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membiayai penyediaan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik yang menjadi urusan Daerah.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pinjaman
Pasal 72

- (1) Dalam melakukan pinjaman jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 200% (dua ratus persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya setelah dikurangi belanja pegawai;
 - b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling rendah 5 (lima);
 - c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - d. mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Menteri dapat menetapkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih tinggi dari 5 (lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah, kecuali yang tidak atau belum digunakan dalam rangka pelayanan publik.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Bagian Keempat
Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 74

- (1) Kepala Daerah menyampaikan usulan pinjaman yang dananya berasal dari penerusan pinjaman kepada Menteri.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari penerusan pinjaman dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman.
- (3) Penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang asing.
- (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri dan Kepala Daerah.

Pasal 75

Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal selain dari penerusan pinjaman dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Menteri dan Kepala Daerah.

Pasal 76

- (1) Pinjaman Daerah berupa pinjaman jangka panjang yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank, dilakukan sesuai prosedur yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman dengan mengacu pada persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman dan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Obligasi Daerah

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 73 serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dengan syarat:
 - a. hasil audit terakhir dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemerintah.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan;
 - b. pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 79

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 80

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;
- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara perhitungan pembayaran bunga;
- g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (2) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (3) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola Obligasi Daerah.

- (3) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
 - e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - g. pertanggungjawaban.

Bagian Keenam

Pelaporan Pinjaman dan Sanksi

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 84

- (1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerah tersebut.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk penerbitan Obligasi Daerah, pelaporan Pinjaman Daerah serta pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

HIBAH

Pasal 86

- (1) Hibah diberikan kepada Daerah dalam rangka:
 - a. penerusan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri;
 - b. penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional dan internasional; dan/atau
 - c. kegiatan tertentu untuk Daerah tertentu berdasarkan usulan

kementerian/lembaga.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan strategis Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan.

Pasal 87

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diusulkan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

DANA DARURAT

Pasal 89

- (1) Dana Darurat dapat dialokasikan kepada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Kriteria bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana.
- (4) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk pelayanan dasar.

Pasal 90

Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diusulkan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 91

Alokasi Dana Darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN
DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 92

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (5) Surplus penerimaan Daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Khusus penggunaan surplus penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam badan usaha milik daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 93

- (1) Dana yang dialokasikan kepada Daerah setelah APBD ditetapkan, dapat langsung digunakan tanpa menunggu perubahan APBD.
- (2) Dalam hal APBD perubahan belum ditetapkan, penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD perubahan.
- (3) Dalam hal APBD perubahan telah ditetapkan, penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- (3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan sosial sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikaitkan dengan penyediaan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum dan sektor unggulan Daerah.
- (7) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 95

- (1) Dana APBD yang dialokasikan untuk penyediaan pelayanan dasar berupa belanja modal dan belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD.
- (2) Dalam hal belanja modal dan belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, yang diakibatkan oleh belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak rasional, Pemerintah Daerah tidak dapat menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95A

- (1) Dana APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari total belanja APBD.
- (2) Dalam hal dana APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tidak dapat menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 97

- (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

- (2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan.
- (3) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD.
- (4) Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- (5) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi transfer dana dari Pemerintah dan antar Pemerintah Daerah.
- (6) Transfer dana dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Hibah dan Dana Darurat.
- (7) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapatan selain PAD dan pendapatan transfer.
- (8) Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (9) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan, antara lain SiLPA, penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan, dan penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 98

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Pasal 100

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.
- (2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 101

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 102

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah harus dibukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor tepat waktu dan tepat jumlah.

Pasal 103

- (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.
- (6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.
- (7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 104

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

Pasal 107

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Bentuk dan isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 110

Hal yang berkenaan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 111

- (1) Menteri menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal suatu Daerah menetapkan defisit melampaui batas maksimal defisit APBD, Menteri dapat memberikan persetujuan pelampauan defisit tersebut sepanjang batas maksimal kumulatif defisit APBD tidak terlampaui.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 112

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - b. Dana Cadangan;
 - c. Pinjaman Daerah;
 - d. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPRD.

- (2) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pembayaran pokok utang;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pembentukan dana cadangan.

Pasal 114

- (1) Penyaluran DAU dan DBH dapat ditunda atau dikonversi dalam bentuk surat utang Negara bagi Daerah yang memiliki SiLPA yang tinggi.
- (2) SiLPA yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melebihi kebutuhan belanja untuk 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya DAU dan DBH yang ditunda atau dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Pasal 115

- (1) Pemerintah melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memberikan insentif bagi Daerah yang kinerjanya baik;
 - b. memberikan insentif non fiskal untuk perbaikan kinerja bagi Daerah yang kinerjanya rendah;
 - c. mengusulkan penghapusan Daerah bagi Daerah yang kinerjanya rendah dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 116

- (1) Pengawasan APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pasal 117

Pejabat tertentu di bidang pengelola keuangan Daerah wajib memiliki sertifikasi di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pendirian;
 - b. penambahan modal.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilakukan dalam rangka:
 - a. memperbaiki struktur permodalan; dan/atau
 - b. meningkatkan kapasitas usaha;
 - c. penyehatan keuangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

Pasal 120

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba/deviden atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).

Pasal 121

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada badan usaha milik daerah dalam rangka:
 - a. meningkatkan kapasitas usaha; dan/atau
 - b. penyehatan keuangan.
- (2) Pemberian pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya kepada badan usaha milik daerah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan

b. seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada badan usaha milik daerah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan tarif barang dan/atau jasa di bawah biaya produksi.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

BAB XI

DANA DEKONSENTRASI

Pasal 123

- (1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk mendanai urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari Dana Dekonsentrasi meliputi kegiatan atau program yang lebih tepat dan efisien dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Kegiatan atau program yang didanai dari Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Kesatu

Penganggaran Dana Dekonsentrasi

Pasal 124

- (1) Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (2) Besaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program atau kegiatan yang akan dilimpahkan.
- (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan tingkat kesejahteraan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Dekonsentrasi
Pasal 125

- (1) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Dana Dekonsentrasi

Pasal 126

- (1) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan urusan.
- (5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 127

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (2) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 129

- (1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB XII

DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 130

- (1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk mendanai urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
- (2) Urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan meliputi kegiatan atau program yang lebih tepat dan efisien dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
- (3) Kegiatan atau program yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.

Bagian Kesatu

Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 131

- (1) Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (2) Besaran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kegiatan atau program yang akan ditugaskan.
- (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan tingkat kesejahteraan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Tugas Pembantuan
Pasal 132

- (1) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan

Pasal 133

- (1) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada bupati atau walikota.
- (4) Bupati dan walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.

Bagian Keempat
Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 134

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan atau program.
- (3) Barang milik negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 136

- (1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB XIII

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah (IKD).
- (2) Penyediaan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
 - c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
 - d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
 - f. mendukung penyelenggaraan SIKD secara nasional.
- (3) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Pasal 138

- (1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional.
- (2) Penyelenggaraan SIKD secara nasional bertujuan:
 - a. membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah dan pengendalian fiskal nasional;
 - b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional; dan

c. membantu Pemerintah dalam melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

(3) Penyelenggaraan SIKD secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 139

(1) Pemerintah daerah menyampaikan IKD kepada Menteri.

(2) Daerah yang terlambat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 140

IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

(1) Persyaratan teknis pemekaran Daerah berdasarkan parameter kesisteman aspek keuangan meliputi:

- a. rasio potensi penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah dan DBH terhadap PDRB;
- b. kesiapan sistem administrasi keuangan;

(2) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

- a. kabupaten/kota baru sekurang-kurangnya sama dengan rasio rata-rata kabupaten/kota lainnya secara nasional;
- b. provinsi baru sekurang-kurangnya sama dengan rasio terkecil provinsi lainnya yang berdampingan.

(3) Kesiapan sistem administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
- b. sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

(4) Persyaratan teknis aspek keuangan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam penilaian kelayakan daerah pemekaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, dan Pasal 66D dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan mengenai DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014.

Pasal 144

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20... NOMOR ...